

Konflik dan Perpecahan Masyarakat di Desa Adat Bugbug, Karangasem dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA

Ni Kadek Ayu Aryani¹, I Ketut Margi², I Wayan Mudana³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Email: ayu.aryani@undiksha.ac.id¹, ketut.margi@undiksha.ac.id²,
wayan.mudana@undiksha.ac.id³*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Konflik dan Perpecahan Masyarakat di Desa Adat Bugbug, Karangasem dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial yang terjadi akibat pergantian kepemimpinan di Desa Adat Bugbug, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik sosial yang muncul, serta mengeksplorasi potensi konflik tersebut sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sosiologi di tingkat SMA. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemimpin desa yang baru menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial. Bentuk konflik yang terjadi meliputi pertentangan antara masyarakat dengan pemerintahan desa, serta konflik internal antar warga desa. Konflik ini memiliki relevansi dengan teori konflik sosial Lewis A. Coser dan teori kepemimpinan Kurt Lewin, yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Terdapat aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA berbentuk bahan ajar dengan materi konflik sosial kelas XI.

Kata Kunci: *Desa Adat Bugbug, Konflik Sosial, Perubahan Kepemimpinan.*

***Conflict and Social Fragmentation
in the Traditional Village of Bugbug, Karangasem and
Its Potential as a Learning Resource for Sociology in Senior High School***

Abstract

This research discusses the Conflict and Community Division in Bugbug Traditional Village, Karangasem and its Potential as a Source of Learning Sociology in High School. The purpose of this study is to analyze the factors causing social conflict that occurred due to the change of leadership in Bugbug Traditional Village, identify the forms of social conflict that emerged, and explore the potential of the conflict as teaching material in sociology learning at the high school level. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques are carried out through direct observation, interviews, and document studies. The results of the study indicate that changes in the policies of the new village leader caused dissatisfaction in the community, thus triggering social conflict. The forms of conflict that occurred included conflicts between the community and the village government, as well as internal conflicts between villagers. This conflict is

relevant to Lewis A. Coser's social conflict theory and Kurt Lewin's leadership theory, which show how changes in leadership can affect the social dynamics of society. There are affective, cognitive, and psychomotor aspects that can be used as sources of learning sociology in high school in the form of teaching materials with social conflict material for class XI.

Keywords: Bugbug Traditional Village, Social Conflict, Leadership Change.

PENDAHULUAN

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percekongan, ketegangan, atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat baik kehidupan individual maupun kehidupan kelompok. Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air, emas, meneral, hutan serta berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah (Chotim, 2017).

Konflik merupakan proses disosiatif, tetapi konflik juga sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan sangat berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan di masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik yang terjadi akan menyebabkan dampak buruk sehingga timbul berbagai kerusakan baik itu kerusakan fisik maupun nonfisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Fenomena konflik dapat terjadi dimana dan kapan saja salah satu contohnya yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan desa (Mahamid, *et.al.*, 2024).

Konflik dalam suatu desa sering kali muncul akibat banyak faktor yang saling terkait, salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin desa memegang peran sentral dalam menjaga harmoni masyarakat, namun apabila kepemimpinan tidak berjalan dengan baik, konflik bisa menjadi tak terhindarkan. Salah satu contoh nyata adalah ketika kepala desa dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi keresahan. Warga mulai mempertanyakan integritas pemimpin, sementara pemimpin mungkin merasa diserang atau tidak dihargai. Situasi ini dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang kepemimpinan tersebut. Selain itu, gaya kepemimpinan yang otoriter sering kali memperparah keadaan. Pemimpin yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung direspon dengan penolakan atau perlawanan. Sebaliknya, ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tegas juga dapat memunculkan konflik, terutama ketika terjadi perselisihan antarwarga yang membutuhkan penyelesaian segera (Putra, 2023).

Konflik juga muncul di salah satu desa tua yang dikenal harmonis dan belum pernah terjadi konflik sebelumnya yaitu di Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Desa Adat Bugbug merupakan salah satu desa tua di Bali yang dikenal karena keharmonisan antara tradisi, alam, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Desa Adat

Bugbug merupakan salah satu desa terbesar di Karangasem yang mempunyai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur. Secara geografis terletak di daerah pesisir pantai. Desa ini mempunyai kegiatan budaya hapir setiap bulan dari Januari sampai Desember (Wikipedia, 2023). Sebagai bagian dari masyarakat Bali Mula, Bugbug masih mempertahankan adat istiadat kuno yang diwariskan oleh leluhur mereka, yang berbeda dari kebanyakan desa di Bali. Meskipun desa ini telah berkembang dan berinteraksi dengan dunia modern, masyarakat Bugbug berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi dan menerima perubahan. Keharmonisan ini tercermin dari kehidupan sehari-hari, seperti gotong-royong dan sebagainya. Desa Adat Bugbug dikenal dengan desa yang harmonis dengan pemimpin yang sebelumnya disegani dan disenangi oleh masyarakat.

Kelian Desa Adat Bugbug sebagai pemimpin komunitas adat memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat dan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, melestarikan tradisi, dan melindungi lingkungan alam serta spiritualitas desa. Agustana & Suprapta (2024) menyatakan bahwa beberapa kebijakan yang umumnya diambil oleh Kelian Desa Adat yaitu pelestarian adat dan budaya, kebijakan hukum adat (*awig-awig*), kebijakan lingkungan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan warisan adat dan budaya. Maka dari itu, Kelian Desa Adat memegang peran penting dalam mengawasi dan menjalankan kebijakan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya ataupun kebijakan baru yang dibuat oleh Kelian Desa Adat, jika kebijakan tersebut dilanggar atau tidak sesuai dengan kehendak sebagian masyarakat desa maka bisa menimbulkan konflik dan perpecahan antar masyarakat.

Konflik masih berlangsung hingga saat ini, mengingat belum ada respon positif dari pihak yang Kelian Desa Adat terhadap masyarakat yang menentang adanya kebijakan baru yang diimplementasikan oleh beliau. Oleh sebab itu, ditakutkan akan muncul aksi protes lebih lanjut yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang kontra terhadap perubahan kebijakan tersebut. Dari uraian tersebut kita ketahui permasalahan ini penting dikaji untuk memetakan faktor-faktor yang memicu konflik dan dampak yang muncul dari perubahan kepemimpinan. Selain itu, konflik ini berpotensi digunakan sebagai sumber belajar khususnya pada mata pelajaran Sosiologi di SMA.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk membedah permasalahan penelitian ini diantaranya, teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis A Coser yang dimana dalam teorinya Coser mengungkapkan terdapat dua bentuk konflik yaitu konflik realistik dan konflik nonrealistik. Teori konflik ini penulis rasa tepat untuk membedah kasus konflik yang ada dalam Desa Adat Bugbug karena di dalamnya berisi pertentangan antara masyarakat dengan pemerintahan desa dan masyarakat dengan masyarakat yang relevan dengan teori konflik Lewis A. Coser. Penulis juga menggunakan teori kepemimpinan oleh Kurt Lewin. Dalam teorinya Kurt Lewin mengklasifikasikan tiga tipe kepemimpinan yang digunakan penulis untuk mengaitkan tipe kepemimpinan yang dijalankan di Desa Adat Bugbug saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, adapaun rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan kepemimpinan oleh Kelian Desa Adat Bugbug saat ini? (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat Desa Adat Bugbug akibat perubahan kebijakan

kepemimpinan? (3) Aspek-aspek apa saja dalam konflik yang terjadi di Desa Adat Bugbug yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA?

METODE

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan guna menghasilkan sebuah penemuan baru yang tidak dapat dicapai apabila menggunakan langkah-langkah secara statistik atau dikenal dengan cara kuantitatif. Pada penelitian kualitatif ini akan memperlihatkan bagaimana kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial serta hubungan kekerabatan. Beberapa tersedia dapat diukur melalui data sensus, namun tetap menggunakan analisis data kualitatif (Sidiq & Choiri, 2019). Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai gejala sosial yang terjadi dan menjadi fokus perhatian yang akan dijelaskan. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi mengenai fakta-fakta dan fenomena dari objek yang diteliti dan dilakukan dengan cara sistematis (Sugiyono dalam Yoga, 2022). Dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan konflik sosial dan perpecahan masyarakat akibat adanya perubahan pemimpin.

Pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Bugbug, Karangasem. Berbagai alasan yang mendasari peneliti mengambil objek penelitian ini adalah salah satunya kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun sebelum tahun 2020 Desa Adat Bugbug belum pernah mengalami konflik serius yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kita ketahui juga bahwa Desa Adat Bugbug merupakan desa tua yang kaya akan adat istiadat dan tradisinya. Setelah lahirnya konflik yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan oleh pemimpin yang baru, peneliti tertarik meneliti hal tersebut dan mencari tahu lebih dalam lagi penyebab utama terjadinya konflik dan perpecahan masyarakat Desa Adat Bugbug. Disisi lain peneliti memiliki ketertarikan dengan adanya konflik yang terjadi saat ini karena banyak aspek-aspek yang terkandung dalam konflik sosial yang bisa dijadikan sumber belajar sosiologi di SMA.

Jenis dan sumber data yang digunakan yakni, aktivitas, narasumber, tempat, lokasi, gambar, dan rekaman, metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu, observasi, wawancara, dan studi dokumen, teknis analisis data yang digunakan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan sata dengan melakukan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Adat Bugbug adalah salah satu desa tradisional di Bali yang terletak di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Desa ini terkenal dengan kekayaan budaya, tradisi, serta keunikan tata ruangnya yang mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Desa Adat Bugbug memiliki struktur kepemimpinan adat yang khas, yang mencerminkan kearifan local dan tradisi turun-temurun. Struktur organisasi desa adat terdiri dari beberapa posisi kunci yang bekerja sama untuk mengelola dan memimpin desa. Pemimpin tertinggi dalam struktur adat yang bertanggung jawab adat keseluruhan kegiatan adat dan budaya di desa dipegang oleh seorang Jero Bendesa. Perlu diketahui bahwa terdapat dua struktur pemerintahan yang berperan dalam mengelola wilayah dan

masyarakatnya yaitu Pemerintahan Desa Dinas dan Pemerintahan Desa Adat. Pemerintahan Desa Dinas adalah struktur pemerintahan resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Pimpinan dari pemerintahan ini disebut Perbekel atau Kepala Desa.

Kebijakan pimpinan adalah serangkaian keputusan, aturan, atau tindakan yang diambil oleh seorang pimpinan untuk mengelola dan mengarahkan suatu organisasi, komunitas, atau wilayah, kebijakan ini dibuat berdasarkan visi, misi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipimpinnya. Kebijakan perubahan merupakan suatu kebijakan yang digunakan sebagai pergantian dari kebijakan yang lama dengan tujuan memperbaikinya. Kebijakan perubahan adalah pergantian satu atau lebih kebijakan yang lain dengan tujuan memperbaiki kebijakan yang telah ada.

Dalam konteks Desa Adat Bugbug, kebijakan pimpinan (Ketua Desa Adat) meliputi: (1) Pengelolaan asset desa meliputi penyewaan atau pemanfaatan tanah adat untuk pariwisata dan pembangunan ekonomi. (2) Pelestarian budaya yaitu mengawasi pelaksanaan upacara adat seperti *Usaba Gumang* dan *Usaba Manggung (Aci Sumbu)*, yang merupakan bagian dari warisan budaya. (3) Pembangunan infrastruktur desa, seperti pengembangan akses jalan ke destinasi wisata, pengelolaan Bukit Asah, dan pengembangan fasilitas umum. (4) Sosialisasi kesehatan dan pendidikan pada masing-masing banjar mengenai pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat dan generasi penerus Desa Adat Bugbug.

Namun diketahui setelah adanya pergantian kepemimpinan, Desa Adat Bugbug di Kabupaten Karangasem, Bali, telah mengalami beberapa perubahan dalam kebijakan kepemimpinan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang dimana perubahan kebijakan pimpinan tersebut menimbulkan konflik antar warga masyarakat Desa Adat Bugbug salah satunya yaitu adanya protes dari krama Desa Adat Bugbug yang tidak menyetujui kebijakan yang diberlakukan oleh pimpinan saat ini, maka pada dilakukanlah *paruman krama desa* untuk membahas perubahan kebijakan yang terjadi dan mengungkapkan tidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan yang melanggar *awig-awig* desa.

Faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Pimpinan Desa Adat Bugbug

Adanya perubahan kebijakan yang terjadi di Desa Adat Bugbug bukan semata-mata hal yang dilakukan secara sengaja oleh Ketua Desa Adat Bugbug yang menjabat saat ini, tetapi hal tersebut dikecam oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap melanggar aturan dan norma yang ada dalam Desa Adat Bugbug itu sendiri. Terdapat beberapa alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan kebijakan tersebut, beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pariwisata merupakan sektor industri yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengembangannya perlu mendapat perhatian khusus karena berpengaruh terhadap arah serta masa depan sektor ini bagi masyarakat. Keunikan budaya dan keindahan alam Bali menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan. Tidak mengherankan jika Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang selalu menarik wisatawan mancanegara. Dengan perannya yang begitu besar dalam industry pariwisata, sektor ini menjadi fokus utama dalam

pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pengembangan pariwisata yang jelas dan berkelanjutan. Di beberapa daerah, industri pariwisata telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian dan mengubah wilayah yang tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah Desa Adat Bugbug, Karangasem, Bali yang memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata kreatif. Tantangan yang muncul adalah bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Adat Bugbug dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat jangka panjang, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan, alam, serta budaya masyarakat setempat. Tentunya daerah yang berpotensi pada bidang pariwisata harus dikelola dengan tepat dengan strategi yang terencana dan berkelanjutkan.

Begitu halnya Desa Adat Bugbug, selain mempertahankan tradisi leluhur, desa ini juga memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Salah satu destinasi unggulan yang popular disana adalah Taman Harmoni Bali yang terletak di Bukit Asah. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Setiap desa memiliki aturan tersendiri dalam tata kelola wisata. Selain pengelolaan tempat wisata Bukit Asah di atas, terdapat satu lokasi tempat yang berpotensi untuk mendatangkan para wisatawan asing, tempat ini juga menjadi akar dari konflik yang muncul di Desa Adat Bugbug sehingga membentuk masyarakat pro dan kontra terhadap dibangunnya tempat tersebut. Tempat ini bernama Neano Resort.

Neano Resort adalah sebuah kompleks resor mewah yang menawarkan berbagai fasilitas bintang lima bagi para tamu yang mencari liburan eksklusif. Vila mewah ini terletak daerah Enjung Awit, Candidasa. Resort ini dibangun di atas bukit dengan jarak kurang dari 2.000 m dari Pura Bukit Gumang yang dalam Perda Tata Ruang Karangasem termasuk Pura Dang Kahyangan. Pembangunan vila mewah ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat, mereka yang menolak menyebut vila tersebut melanggar *bhisama* kesucian pura. Sedangkan sebagian masyarakat yang mendukung pembangunan vila mewah tersebut menilai pembangunan fasilitas wisata merupakan buah dari perjuangan untuk mendatangkan investor ke Karangasem dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

2. Kebijakan Lama yang Kurang Efektif

Kebijakan merupakan serangkaian prinsip, aturan, atau keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Namun, dalam praktiknya tidak semua kebijakan berjalan sesuai harapan. Dalam konteks Desa Adat Bugbug, Kelihan Desa Adat yang baru mungkin menganggap kebijakan pemimpin sebelumnya kurang efektif karena beberapa alasan, terutama terkait pengelolaan tanah adat, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa alasan yang bisa menjadi dasar evaluasi ini antara lain:

a. Kurangnya Optimalisasi Tanah Adat

Dalam kasus Desa Adat Bugbug, hal ini ditunjukkan dengan adanya anggapan bahwa pemimpin sebelumnya lebih konservatif dalam mengelola tanah adat, sehingga tidak banyak investasi atau proyek ekonomi yang berkembang. Kelihan Desa Adat yang baru melihat bahwa dengan menyewakan tanah adat kepada investor, desa ini

bisa mendapat pemasukan tetap untuk kas desa. Kemudian, kebijakan baru ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang sebelumnya kurang produktif.

b. Infrastruktur Desa yang Belum Berkembang Pesat

Pemimpin sebelumnya dinilai belum memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, fasilitas publik, dan akses menuju lokasi wisata. Kelihan Desa Adat yang baru ingin mempercepat pembangunan infrastruktur agar desa lebih kompetitif dalam industri pariwisata. Dengan adanya proyek seperti Neano Resort, diharapkan infrastruktur desa dapat berkembang lebih cepat dan menarik lebih banyak wisatawan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Adat Bugbug maupun desa yang dekat dengan lokasi Neano Resort.

c. Kurangnya Lapangan Kerja dan Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat

Lapangan kerja dan peluang ekonomi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Desa Adat Bugbug masih sangat tergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan warga. Kelihan Desa Adat yang baru ingin membuka peluang kerja baru dengan membangun sektor pariwisata dan properti. Dengan adanya investasi di bidang perhotelan dan villa mewah seperti Neano Resort, masyarakat bisa bekerja di sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan layanan wisata.

Bentuk – Bentuk Konflik Sosial yang Terjadi di Desa Adat Bugbug

Bentuk-bentuk konflik sosial yang muncul di Desa Adat Bugbug yang faktor penyebab utamanya adalah perubahan kebijakan kepemimpinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis konflik berdasarkan skala dan aktor yang terlibat dan juga melihat konflik ini berkaitan dengan teori konflik milik Lewis A. Coser. Konflik ini berawal dari kebijakan yang dibuat oleh Kelihan Desa Adat baru yang dinilai oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan hukum adat (*awig-awig*) yang berlaku di dalam desa. Berikut adalah bentuk konflik sosial yang terjadi di Desa Adat Bugbug.

1. Konflik Horizontal

Konflik horizontal menurut Lewis A. Coser adalah konflik yang terjadi antara individua atau kelompok yang memiliki kedudukan sosial yang relative setara dalam masyarakat. Konflik ini biasanya terjadi di dalam kelompok atau antar kelompok yang memiliki status sejajar, bukan antara pihak yang memiliki hubungan hierarkis. Meskipun konflik sering kali dianggap sebagai faktor pemecah dalam sistem sosial, Coser menyoroti bahwa konflik juga memiliki fungsi positif dan dapat bersifat integratif. Namun, dalam beberapa kasus, konflik dapat mengancam stabilitas sistem sosial terutama terjadi dalam masyarakat yang memiliki hubungan segmental.

Konflik di Desa Adat Bugbug merupakan konflik horizontal karena terjadi antarwarga dalam satu komunitas yang sama yaitu masyarakat adat desa. Konflik ini mencerminkan benturan kepentingan antar sesama warga. Perubahan kebijakan pemimpin di Desa Adat Bugbug yang terjadi pada tahun 2020 memicu perpecahan

menjadi dua kelompok di antara masyarakat. Yang dimana sebagian masyarakat mendukung kebijakan Kelihan Desa Adat dan sebagian lainnya menentang kebijakan Kelihan Desa Adat karena kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah berlaku sejak dahulu. Kelompok pro pembangunan mendukung proyek karena melihatnya sebagai peluang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan desa. Kelompok kontra pembangunan menolak proyek karena alasan kurangnya transparansi, dugaan pelanggaran, serta potensi gangguan terhadap kawasan suci Pura Gumang. Sebagian warga menentang keputusan parajuru desa (pihak adat yang mengelola desa) yang dianggap tidak transparan dalam menyewakan tanah desa kepada investor. Beberapa warga bahkan melaporkan Kelihan Desa Adat Bugbug atas dugaan penyerobotan tanah desa, selain itu juga terdapat aksi-aksi protes yang dilakukan secara langsung oleh krama desa.

2. Konflik Vertikal

Menurut Coser (dalam Chotim, 2017) mengemukakan konflik vertikal adalah jenis konflik yang terjadi antara kelompok atau individu dengan pihak yang memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih tinggi, seperti antara masyarakat dengan pemerintah, atau antara pekerja dengan pengusaha. Konflik ini terjadi karena ketidakadilan, ketidakpuasan, atau ketimpangan dalam pembagian kekuasaan, sumber daya, atau kesempatan. Konflik vertical sering kali melibatkan perjuangan untuk memperoleh hak-hak atau akses yang dianggap tidak setara, seperti dalam kasus protes terhadap kebijakan pemerintah atau tuntutan terhadap perusahaan. Dengan kata lain, konflik vertikal muncul apabila konflik diciptakan oleh dua kelompok sosial yang memiliki perbedaan kekuatan, kepentingan, kekuasaan, maupun otoritas.

Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan Kelian Desa Adat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan adat. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Kelian Desa Adat yang baru dianggap bertentangan dengan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Bugbug. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penyewaan tanah desa adat untuk kepentingan komersial tanpa melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat. Selain itu, penggunaan area suci desa sebagai tempat wisata juga menjadi isu sensitif, karena dianggap tidak menghormati nilai-nilai spiritual yang telah dijaga oleh masyarakat Bugbug selama ini. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang merasa bahwa pemimpin tidak lagi menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum adat. Bentuk konflik vertikal dalam kasus Desa Adat Bugbug dapat dilihat pada masyarakat kontra dengan prajuru desa (Kelihan Adat dan aparat desa). Hal ini terlihat dari sebagian warga menolak proyek karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Warga yang kontra bahkan melaporkan Kelihan Desa Adat ke Polda Bali atas dugaan penyerobotan tanah dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek ini. Selain itu, konflik vertikal juga terlihat pada konflik antara masyarakat yang kontra dengan investor, investor dianggap memanfaatkan perjanjian dengan prajuru desa tanpa adanya konsultasi dengan krama desa. Warga yang menolak proyek merasa bahwa investor tidak memperhatikan dampak lingkungan dan budaya, terutama karena lokasi proyek dekat dengan Pura Gumang yang merupakan kawasan suci. Beberapa aksi protes warga ditujukan langsung kepada pihak investor dan pengelola proyek.

3. *Konflik Realistik*

Menurut Lewis Coser konflik realistik merupakan konflik yang berasal dari adanya kekecewaan individu maupun kelompok sosial masyarakat terhadap sistem atau tuntutan yang ada hubungan sosialnya (Dermatoto, 2010). Konflik ini dinyatakan sebagai realisasi dari ketidaksesuaian antara harapan dengan apa yang terjadi. Sederhananya, konflik realistik ini menjadi wujud konflik yang dilakukan untuk menolak suatu perubahan yang dipaksakan untuk dikehendaki atau menolak perubahan yang tidak dikehendaki oleh kelompok sosial di masyarakatnya. Dalam kasus Desa Adat Bugbug, perubahan kebijakan oleh pemimpin baru menimbulkan konflik karena ada perbedaan kepentingan dan persepsi terhadap tradisi yang sebelumnya berjalan dengan harmonis. Kebijakan baru tersebut menganggu keseimbangan nilai-nilai yang telah ada sejak lama dan memicu kekecewaan masyarakat.

Konflik di Desa Adat Bugbug terkait pembangunan termasuk dalam konflik realistik karena permasalahan berakar pada benturan kepentingan ekonomi dan pelestarian adat yang nyata. Kelompok pro pembangunan melihat pembangunan tempat wisata baru sebagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa melalui pendapatan dari penyewaan tanah dan lapangan kerja. Sedangkan, kelompok kontra pembangunan menolak proyek karena dianggap mengancam tradisi, hukum adat, dan kesucian kawasan suci seperti Pura Gumang. Benturan kepentingan ini menunjukkan bahwa konflik bersifat realistik karena melibatkan sumber daya berupa tanah adat dan pengelolaannya. Pada konflik ini juga terjadi ketegangan antara struktur kekuasaan dalam desa yang ditunjukkan dengan prajuru desa yang tidak transparan terutama pada saat mengambil keputusan terkait penyewaan tanah kepada investor. Hal ini menunjukkan pertarungan kepentingan dalam struktur sosial desa, di mana ada ketidakpuasan terhadap otoritas yang memegang kendali atas aset desa.

4. *Konflik Nonrealistik*

Menurut Lewis A Coser yang dikutip dari Nusantari, 2018 mengemukakan bahwa konflik non realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Contoh konflik yang tidak realistik adalah pembalasan dendam dengan menjadikan satu orang sebagai kambing hitam atas pembalasan dendam tersebut. Sekalipun konflik non realistik melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan, namun ada keinginan untuk membebaskan ketegangan setidaknya pada salah satu pihak. Jika dibandingkan dengan konflik realistik, konflik non realistik kurang stabil. Pilihan-pilihan fungsional bukan sebagai alat tetapi objek itu sendiri.

Konflik non realistik bukan berasal dari tujuan saingan yang antagonis tetapi lebih kepada cara meredakan ketegangan sosial dan emosional, maka dalam kasus konflik Desa Adat Bugbug, konflik non realistik dapat ditemukan dalam beberapa aspek seperti aksi protes sebagai bentuk pelepasan ketegangan. Aksi protes yang dilakukan oleh kelompok kontra pembangunan tidak hanya bertujuan untuk menggagalkan proyek, tetapi juga sebagai saluran ekspresi ketidakpuasan terhadap pemimpin desa dan investor. Ini mencerminkan konflik non realistik karena kasus tersebut lebih bersifat emosional dan

simbolis daripada strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi atau politik yang jelas.

Muncul juga tuntutan hukum terhadap Kelihan Desa Ada tatas dugaan penyalahgunaan wewenang bukan karena masalah hukum, tetapi juga sebagai cara masyarakat menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemimpin desa. Beberapa warga yang melaporkan pemimpin adat mungkin tidak hanya berfokus pada aspek legalitas penyewaan tanah, tetapi juga ingin menegaskan perasaan ketidakadilan dan keseimbangan kekuasaan dalam desa.

Aspek-Aspek yang Dapat Dijadikan Sumber Belajar

Terdapat analisis aspek-aspek yang terkait sebagai sumber belajar pada materi konflik sosial dan resolusi konflik sehingga kasus konflik dan perpecahan masyarakat Desa Adat Bugbug dapat dijadikan alternatif sumber belajar yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya sumber belajar ini dapat memenuhi beberapa karakteristik (Siregar & Harnini dalam Sijabat, 2024) yaitu pertama guru dapat mengembangkan keahliannya dalam menyampaikan suatu materi dengan ciri khas yang berbeda pada saat proses belajar di kelas. Kedua, sumber belajar membawa dampak positif bagi siswa yakni untuk lebih bisa berpikir kritis terhadap isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Ketiga, sumber belajar menjadikan suasana belajar dan mengajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton dan siswa juga mempunyai kesempatan untuk mengesplor lebih banyak kasus-kasus konflik yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Beranjak dari penjelasan mengenai sumber belajar di atas, konflik dan perpecahan masyarakat Desa Adat Bugbug menjadi salah satu sumber belajar karena pada penelitian tersebut diuraikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang dimana dengan uraian tersebut siswa bisa mengetahui alasan konflik itu bisa terjadi dan berpikir kritis tentang bagaimana mencari solusi dengan adanya konflik yang terjadi tersebut. Berikut penjelasan analisis aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Berdasarkan rumusan masalah kedua yaitu bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat Desa Adat Bugbug. Topik ini masuk ke dalam materi konflik dan resolusi konflik. Maka peneliti mendapatkan beberapa aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar Sosiologi di SMA kelas XI yaitu: 1) adanya konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat desa yang diakibatkan oleh kebijakan pemimpin yang tidak sesuai dengan peraturan desa dan ditentang oleh masyarakat, sehingga muncul konflik antara masyarakat dan pemerintah desa, 2) adanya faktor penyebab konflik yaitu perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin memiliki tujuan yang baik yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun kebijakan tersebut melanggar peraturan desa dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga muncul masyarakat pro dan kontra.

Selain itu, adapaun analisis aspek-aspek yang dapat dijadikan sumber belajar dalam penelitian ini yang dikaji berdasarkan analisis Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom memiliki tiga ranah di antaranya 1) ranah kognitif, yang mencakup ingatan dan pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola procedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan skill intelektual (Huda, 2013), 2) ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi, 3) ranah

psikomotor yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulaitg atau keterampilan motorik. Kegita aspek tersebut juga menjadi salah satu pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah sehingga hal tersebut juga relevan dikaitkan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam konflik dan perpecahan masyarakat Desa Adat Bugbug.

1. Ranah Kognitif

Pada ranah ini berkaitan dengan aktivitas berpikir yang dimiliki oleh peserta didik yang diterima dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Dalam ranah ini terdapat enam tahapan proses pola pikir meliputi, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam kasus ini konflik di Desa Adat Bugbug dapat digunakan untuk melatih ketrampilan berpikir siswa dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial. Beberapa aspek yang dapat dikembangkan yaitu: mengidentifikasi faktor penyebab konflik di Desa Adat Bugbug, menguraikan bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi, mengkaji dampak konflik terhadap kehidupan sosial dan budaya, dan Menyusun startegi resolusi konflik berbasis kearifan lokal.

2. Ranah Afektif

Dalam ranah ini, peserta didik dapat ditinjau dari segi aspek moral, yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Melalui ranah ini guru memiliki kesempatan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai dan norma yang harus diinternalisasikan untuk dapat membentuk watak peserta didik ke arah yang lebih baik. Beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada ranah ini yaitu: mendengarkan pendapat masyarakat yang terdampak konflik dengan sikap terbuka, berpartisipasi dalam diskusi mengenai dampak sosial dari konflik masyarakat adat, menunjukkan sikap menghormati budaya dan hukum adat setempat, dan menjadi agen perubahan yang mendukung penyelesaian konflik berbasis dialog.

3. Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik adalah ranah yang memiliki keterikatan dengan hasil yang sudah dicapai sewaktu proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini berkaitan dengan melibatkan keterampilan fisik siswa. Dengan demikian, konflik ini juga dapat menjadi sumber belajar yang melatih keterampilan sosial dan komunikasi siswa. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan yaitu: memerankan peran dalam simulasi resolusi konflik berbasis musyawarah adat, melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai konflik yang terjadi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji konflik sosial yang terjadi di Desa Adat Bugbug, Karangasem, Bali, akibat perubahan kebijakan oleh Kelian Desa Adat yang baru. Perubahan tersebut, khususnya terkait pengelolaan tanah adat untuk kepentingan pariwisata seperti pembangunan Neano Resort, memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Konflik ini dipicu oleh ketidaksetujuan sebagian masyarakat atas kebijakan yang dianggap melanggar norma adat (awig-awig) dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian konflik sosial yang disebabkan oleh perubahan kebijakan di Desa Adat Bugbug, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial di Desa Adat Bugbug dipicu oleh perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Kelian Desa. Faktor-faktor utama yang menyebabkan konflik ini adalah perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat, kurangnya komunikasi dalam pengambilan keputusan, serta ketidakseimbangan distribusi sumber daya. Konflik yang terjadi di Desa Adat Bugbug bersifat terbuka maupun tersembunyi. Konflik terbuka ditandai dengan protes masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, sementara konflik tersembunyi berupa ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang tidak tersampaikan secara langsung. Konflik ini berdampak pada hubungan sosial masyarakat yang menjadi kurang harmonis serta kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan adat.

Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa yang menjadi terganggu akibat perpecahan sosial. Bentuk konflik yang muncul terdiri dari: (1) Konflik horizontal antar warga masyarakat, (2) Konflik vertikal antara masyarakat dengan pemimpin adat dan investor, (3) Konflik realistik yang berakar pada kepentingan ekonomi dan adat, (4) Konflik nonrealistik yang lebih bersifat emosional dan simbolik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus konflik di Desa Adat Bugbug memiliki potensi besar sebagai sumber belajar sosiologi di SMA, terutama dalam materi konflik sosial. Dengan menganalisis aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan Taksonomi Bloom, konflik ini dapat menjadi bahan ajar yang mendorong siswa berpikir kritis, memahami nilai-nilai sosial, serta melatih keterampilan resolusi konflik berbasis musyawarah adat.

Bagi pemerintah Desa Adat Bugbug, disarankan untuk lebih mengutamakan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya yang menyangkut aset desa dan nilai-nilai adat. Musyawarah terbuka dengan seluruh krama desa perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan. Selain itu, masyarakat Desa Adat Bugbug, diharapkan mampu menjaga semangat kebersamaan dan menyelesaikan perbedaan pandangan secara damai, melalui jalur musyawarah dan hukum adat, tanpa mengorbankan keharmonisan sosial yang telah lama terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustana, P., & Suprapta, N. (2024). Kebijakan Desa Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Locus*, 16(1), 89-102
- Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Demartoto, A. (2010). Strukturalisme konflik: pemahaman akan konflik pada masyarakat industri menurut lewis coser dan ralf dahrendorf. dalam *Jurnal Dilema Sosiologi* Issn, 0215-9635.
- Huda, M. (2013). Model-model pengajaran dan pembelajaran: Isu-isu metodis dan paradigmatis. *Pustaka pelajar*.
- Mahamid, M. N. L., Ardhana, D. A., Rochmad, I. N., Hasan, Q. T., & Hidayatulloh, H. (2024). Writing Village History: A Learning Model for Undergraduate Thesis Project. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(3), 507-517. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i3.258>.
- Nursantari, A. R. (2018). Konflik sosial dalam novel O karya Eka Kurniawan (Kajian konflik sosial Lewis A. Coser). *Skripsi Universitas Negeri Surabaya*.
- Putra, A. A. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/4>.
- Sidiq, U., dan Choiri, M. M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sijabat, R. E. (2023). Penyimpangan Remaja Dalam Web Series Little Mom dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA. *Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha: Singaraja*.
- Yoga, I. D. (2022). Peran Struktur Sosial Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Tradisi Seetan Pada Masyarakat Desa Adat Susut Kelod dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA. *Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha: Singaraja*.